

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Paul Grady dalam Suwardjono (2017: 9) adalah:

“Accounting is the body of knowledge and sunctions concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summaring, analyzing, interpreting, and supplying of dependable and significant information covering transactions and events which are, in part at least, of a financial character, required for the management and operation of an entity and for reports that have to be submitted thereon to fiduciary and other responsibilities”

Menurut Siswanti, dkk (2022: 3) pengertian akuntansi adalah: “... proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau yang membutuhkan sebagai informasi berkaitan dengan kondisi keuangan suatu entitas.

Menurut pengertian akuntansi menurut Rudianto (2013: 9), sebagai berikut:

“Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan”.

Adapun definisi akuntansi menurut Gade (2005: 5) adalah: "... ilmu pengetahuan terapan dan seni pencatatan yang dilakukan secara terus menerus menurut system tertentu, mengolah dan menganalisis catatan tersebut sehingga dapat disusun suatu laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pimpinan perusahaan atau lembaga terhadap kinerjanya".

Berdasarkan beberapa pengertian akuntansi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa akuntansi merupakan suatu system informasi meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran yang didasarkan pada transaksi-transaksi keuangan yang menyediakan informasi keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Akuntansi

Menurut Siswanti, dkk (2022: 16) ada 12 jenis akuntansi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. "Akuntansi Keuangan
Akuntansi keuangan adalah bagian dari ilmu akuntansi yang berfokus pada penyajian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan sendiri terdiri dari neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Akuntansi keuangan berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Akuntansi Manajemen
Akuntansi manajemen adalah suatu sistem yang berhubungan dengan penggunaan informasi akuntansi yang berguna untuk manajemen dalam suatu organisasi. Akuntansi manajemen berfungsi untuk mengontrol perusahaan agar bisnis dijalankannya lancar dan tidak mengalami kerugian
3. Auditing
Auditing sering pula dikenal dengan akuntansi pemeriksaan. Tujuan auditing sendiri ialah melakukan pemeriksaan terhadap transaksi dan laporan keuangan secara menyeluruh. Dengan adanya auditing maka

laporan keuangan yang disajikan lebih terpercaya, transparan, andal, dan objektif.

4. Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan akuntansi yang berlandaskan pada nilai atau syariat Islam. Akuntansi syariah memberlakukan segala proses akuntansi secara syariah seperti mengikuti hukum-hukum Islam. Akuntansi syariah sendiri muncul karena pertumbuhan bank syariah yang begitu pesat.

5. Akuntansi Perbankan

Akuntansi perbankan merupakan akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan data keuangan lembaga perbankan. Akuntansi perbankan sama dengan akuntansi keuangan umum namun terdapat perbedaan pada akunnya. Dalam akuntansi perbankan terdapat akun khusus yang dipakai untuk lembaga keuangan dan terdapat dua sistem pencatatan yakni accrual basis untuk mencatat biaya dan cash basis dalam mencatat pendapatan.

6. Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya adalah kegiatan pencatatan, pengukuran hingga proses melaporkan keuangan dengan menggolongkan dan meringkas biaya produksi. Fokus dari akuntansi biaya adalah biaya produksi untuk menentukan harga pokok suatu produk.

7. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan berkaitan erat dengan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan mengatur pelaksanaan anggaran dan melaporkan distribusi anggaran lebih transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Akuntansi ini sering pula digunakan untuk pembukuan lembaga nonprofit.

8. Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak berhubungan dengan perhitungan pajak. Akuntansi ini digunakan untuk memperhitungkan besaran pajak wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi. Tugas akuntan pajak sendiri adalah menyiapkan laporan pajak yang mampu digunakan untuk perencanaan dan kebijakan pajak dengan surat pemberitahuan pajak. Akuntan pajak juga membuat analisa dan estimasi atas potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang.

9. Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan berfokus pada dunia pendidikan akuntansi. Akuntansi ini meliputi pengolahan data transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan untuk lembaga pendidikan.

10. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang bertugas membuat skema perencanaan dan penerapan prosedur dalam mengolah transaksi keuangan sebagai informasi keuangan. Sistem informasi akuntansi akan mempermudah dan melancarkan data transaksi agar lebih mudah diolah.

11. Akuntansi Sosial

Akuntansi ini bertugas menangani proses keuangan dalam hal dampak sosial yang berdampak dari aktivitas ekonomi suatu entitas. Akuntansi sosial biasa pula dikenal sebagai akuntansi pertanggungjawaban.

12. Akuntansi Internasional

Akuntansi ini berhubungan dengan perdagangan internasional. Penerapannya melalui perbandingan prinsip akuntansi antarnegara dan mengharmonisasikan standar akuntansi di dunia. Perbedaan standar akuntansi bisa saja terjadi karena pengaruh budaya bisnis, politik, regulasi, dan nilai mata uang”.

Adapun menurut Rudianto (2012: 5) secara umum akuntansi dibagi menjadi dua jenis, di antaranya adalah:

“Secara umum, jika dilihat dari siapa pemakai laporan keuangan perusahaan, akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya.
2. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan, seperti manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen.”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi yang sering ditemui adalah akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

2.1.1.4 Fungsi Akuntansi

Beberapa fungsi dari akuntansi menurut Siswanti, dkk (2022: 10) antara lain sebagai berikut:

1. *“Recording Report*
Recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke *account ledger* sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi.
2. Melindungi Properti dan Aset

Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.

Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian tak sah.

3. Mengkomunikasikan Hasil

Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya.

4. *Meeting Legal*

Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan-Pajak, Pengambilan Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.

5. Mengklasifikasikan

Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokan jenis transaksi atau entri.

6. Membuat Ringkasan

Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

7. Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis.

Selain itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa mendatang dan *framing* dari kebijakan untuk melaksanakan rencana tersebut”.

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2012: 6) definisi laporan keuangan adalah: “... laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Laporan keuangan menurut Wastam (2018: 2) adalah: "... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan".

Menurut Fahmi (2015:2), pengertian laporan keuangan adalah: "... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja perusahaan tersebut".

Menurut Enni Savitri Savitri (2016: 13) pada prinsipnya laporan keuangan adalah:

"... suatu susunan daftar atau ringkasan sebagai pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak penilai yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai lembaga yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana prestasi atau hasil kinerja suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan sebagai perbandingan apakah kinerjanya lebih baik atau tidak dengan melihat sisi kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan."

Dari kutipan diatas dapat diinterpretasikan bahwa laporan keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Maksud kondisi keuangan saat ini merupakan kondisi keuangan perusahaan terkini.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Kasmir (2017: 7), mengemukakan bahwa: secara umum ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. "Neraca
Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat berdasarkan periode tertentu (tahunan). Akan tetapi, pemilik atau manajemen dapat pula meminta laporan neraca

sesuai kebutuhan untuk mengetahui secara persis berapa harta, utang, dan modal yang dimilikinya pada saat tertentu.

2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu. Artinya laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan perubahan modal
Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Kemudian, laporan ini juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan.
5. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dip perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu”.

Menurut Prihadi (2019: 4) ada empat jenis laporan keuangan yang dibuat

oleh perusahaan yaitu:

1. “Laporan posisi keuangan neraca
Laporan posisi keuangan neraca yang menggambarkan posisi keuangan berupa asset, utang, dan ekuitas (modal) pada satu saat.
2. Laporan laba rugi
Laporan laporan laba rugi yang menggambarkan kinerja yang tercermin dari laba, yaitu selisih pendapatan dan biaya, selama satu periode.
3. Laporan arus kas
Laporan arus kas yang meberikan gambaran bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas dari aktivitas opesasi, investasin dan pendanaan selama satu periode.
4. Laporan perubahan ekuitas
Laporan perubahan ekuitas yang berisi perubahan ekuitas yang berasal dari kinerja internal berupa laba dan pembagian dividen, serta pengaruh dari perusahaan komposisi setoran modal”.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Menurut Fitriastuti dan Sari (2022: 19) unsur-unsur laporan keuangan terdapat dalam akun yang terbagi atas beberapa jenis sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Akun-akun yang terdapat dalam Neraca (Fitriastuti dan Sari, 2022:19), meliputi:

a. Aset (Harta)

Aset adalah harta yang terdapat dan digunakan di dalam kegiatan perusahaan, yang bersumber dari utang maupun modal. Aset sendiri dikelompokkan dalam beberapa kelompok aset, yakni:

- **Aset Lancar**, adalah jenis aset yang dimiliki dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun, disusun berdasarkan likuiditas, mulai yang paling likuid ke tidak likuid. Aset lancar dapat juga diartikan sebagai aset yang segera berubah bentuk menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Aset lancar disusun: (a) Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan (b) Bank adalah jumlah saldo simpanan di bank sampai tanggal pelaporan, (c) Investasi Jangka Pendek (Surat Berharga/Deposito), adalah jenis investasi yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun, (d) Piutang Usaha/Dagang, adalah hak atau klaim yang dimiliki perusahaan dari transaksi usaha, (e) Perlengkapan sebagai bahan habis pakai dalam proses usaha, (f) Persediaan (khusus perusahaan dagang dan manufaktur), adalah barang maupun bahan yang dimiliki untuk dijual kembali atau untuk diolah menjadi barang jadi yang kemudian dijual, (g) Beban dibayar di muka, merupakan beban yang dikeluarkan terlebih dahulu meskipun waktu pengakuan beban belum dijalani, (h) akun lain yang dapat dikelompokkan sebagai aset lancar.
- **Investasi Jangka Panjang**, adalah kelompok aset yang dimiliki dalam bentuk investasi pada entitas lain maupun jenis investasi lainnya, khusus investasi keuangan, dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Termasuk dalam kelompok aset ini adalah (a) investasi pada saham, yakni investasi yang dilakukan melalui kepemilikan saham pada entitas lain, (b) investasi pada obligasi, yakni jenis investasi yang dilakukan melalui pembelian obligasi (surat utang) yang diterbitkan oleh entitas lain, dan aset lain yang dapat dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.
- **Aset Tetap**, adalah kelompok aset (berwujud) yang dimiliki entitas usaha selama lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasional normal perusahaan. Kelompok aset ini disusun berdasarkan kekelannya (masa waktu pakainya), dan harus dialokasikan harga

perolehannya selama masa manfaat aset melalui proses depresiasi/penyusutan. Aset disusun: (a) Tanah, merupakan aset yang dimiliki sendiri oleh entitas usaha dan untuk operasional perusahaan, yang aset ini merupakan satu- satunya aset tetap yang tidak disusutkan karena diasumsikan manfaatnya tidak akan berkurang seperti jenis aset tetap yang lain, (b) Bangunan, (c) Kendaraan, (d) Mesin, (e) Peralatan, dan aset lain yang dapat digolongkan sebagai aset tetap.

- **Aset Tetap Berwujud**, adalah kelompok aset (tidak berwujud) yang dimiliki entitas usaha selama lebih 1 tahun dan digunakan dalam operasional normal perusahaan. Kelompok aset ini disusun berdasarkan umur/masa manfaat, dan harga perolehan akan dialokasikan selama masa manfaatnya melalui proses amortisasi. Termasuk dalam kelompok aset ini di antaranya: (a) Goodwill, merupakan aset tetap tidak berwujud yang dimiliki entitas sebagai akibat dari adanya kombinasi bisnis baik merger maupun akuisisi, di mana harga perolehan entitas tersebut lebih rendah daripada harga pasarnya, (b) Hak paten, (c) Hak Cipta, (d) Hak Waralaba (Franchise), dan aset lain yang dapat digolongkan ke dalam kelompok aset tetap tidak berwujud.
- **Aset lain-lain**, merupakan kelompok aset yang disediakan bagi aset lain yang dimiliki oleh suatu entitas yang tidak dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok aset sebelumnya. Sebagai contoh akun Bangunan dalam Konstruksi, di mana bangunan untuk operasional perusahaan konstruksi/dibangun sendiri oleh perusahaan lebih dari 1 periode pelaporan keuangan. Bangunan ini belum dapat dikelompokkan sebagai aset tetap karena belum selesai/digunakan untuk operasional, sehingga dikelompokkan ke dalam kelompok aset lain-lain.
Kelompok aset tersebut bukanlah hal mutlak yang harus dimiliki sebuah entitas. Ada kalanya ketika sebuah entitas tidak memiliki investasi jangka panjang, maka kelompok aset ini tidak akan ditemukan dalam laporan keuangannya. Begitu pula halnya dengan unsur akun yang terdapat di dalamnya, misalnya perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan karena tidak melakukan jual beli barang sehingga dalam kelompok aset lancarnya tidak ditemukan akun persediaan.

b. Utang (Kewajiban)

Utang adalah kewajiban suatu entitas usaha kepada pihak ketiga yang dibayar/dilunasi dengan cara menyerahkan aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Utang (kewajiban) dikelompokkan dalam beberapa kelompok sebagai berikut:

- **Utang Lancar**, merupakan kewajiban yang dimiliki entitas dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun, dan akan dilunasi dengan menggunakan aset lancar. Utang lancar terdiri atas: (a) utang usaha, yakni utang yang timbul dari kegiatan usaha entitas, (b) pendapatan diterima di muka, yakni pendapatan yang telah diterima terlebih dahulu namun jasanya belum diberikan, (c) utang pajak, yakni kekurangan pajak yang harus dibayarkan, dan utang lain yang dapat dikelompokkan sebagai utang lancar.

- **Utang Jangka Panjang**, merupakan kewajiban yang dimiliki entitas dengan masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun, terdiri atas; (a) utang bank, yakni utang kepada pihak bank, (b) utang obligasi, yakni surat utang yang diterbitkan oleh entitas dan dibeli oleh pihak ketiga sehingga muncul kewajiban untuk melunasinya di kemudian hari, dan utang lainnya yang dapat dikelompokkan sebagai utang jangka panjang.

c. Ekuitas (Modal)

Ekuitas atau dikenal dengan istilah modal merupakan hak yang dimiliki pemilik atas aset perusahaan. Akun ini menggambarkan jenis modal yang dimiliki oleh sebuah entitas. Jenis entitas bisnis dapat diidentifikasi dari akun ini, sebagai contoh jika jenis modal yang dimiliki adalah modal pemilik maka entitas bisnis tersebut merupakan jenis perusahaan perorangan, demikian pula jika jenis modal yang dimiliki adalah modal saham maka entitas bisnis tersebut merupakan jenis perusahaan perseroan. Akun ini di Neraca/Laporan Posisi Keuangan menggambarkan nilai modal/ekuitas akhir yang dimiliki entitas pada tanggal tertentu, sebagai hasil akumulasi modal/entitas awal dengan laba tahun berjalan.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Fahmi (2015: 99) secara umum unsur-unsur yang terkandung dalam laporan laba rugi (*income statement*) adalah:

a. Penjualan (Sales)

Sale (penjualan) merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang dagangan atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan (Siegel dan Shim). Di sisi lain penjualan menurut (Jumingan) merupakan, "Penghasilan utama dari perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau perusahaan industri berupa hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli, langganan, penyewa, dan pemakai jasa lainnya." Penjualan kotor dilihat sebagai *gross sales* dan penjualan bersih dilihat sebagai *net sales*. Suatu penjualan dikatakan berhasil jika harga jual barang adalah lebih tinggi dibandingkan harga produksi, atau harga beli bagi perusahaan dagang. Harga jual harus bisa menutup:

- Harga pokok barang yang dijual.
- Biaya operasi, yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi & umum, seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, biaya komisi penjualan, biaya promosi, dan lain-lain.
- Laba yang diinginkan oleh perusahaan.

b. Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold)

Harga pokok penjualan merupakan harga beli atau pembuatan suatu barang yang dijual, juga disebut *cost of goods sold* (Siegel dan Shim). Pada dasarnya harga pokok penjualan sama dengan harga pokok pembelian seandainya tidak ada persediaan barang dagangan." Namun berdasarkan pada kondisi dan realita di lapangan tetap ada ditemukan barang-barang yang tersisa atau tidak terjual semuanya. Dan barang yang tidak terjual tersebut nantinya akan menjadi persediaan (*inventory*) pada tahun selanjutnya. Mengenai harga pokok

penjualan ini ada perbedaan jika kita melihat dari segi perspektif perusahaan dagang dan industri. Bagi perusahaan dagang, harga pokok penjualan adalah harga pokok barang dagangan yang dibeli yang kemudian berhasil dijual selama suatu periode akuntansi.

c. Depresiasi (*Depreciation*)

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi penting, sehingga *cost* yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus.

d. Bunga (*Interest*)

Bunga merupakan balas jasa yang harus diberikan atas dasar kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan. Dalam persoalan bunga biasanya dikenakan bagi mereka yang mengambil pinjaman atau keputusan kredit, seperti kredit ke perbankan. Dalam pencatatan akuntansi untuk bunga kredit dipergunakan dua bentuk yaitu cash basis dan accrual basis yang mana masing-masingnya memiliki tempatnya tersendiri, yaitu:

- 1) Cash basis. Pencatatan secara *cash* basis akan dilakukan apabila kredit tersebut pembayarannya mengalami permasalahan seperti kredit dalam pengawasan atau pantauan khusus, kredit macet, kredit yang harus dikaji ulang atau diragukan, serta kredit yang dianggap pembayarannya tidak lancar.
- 2) Accrual basis. Pencatatan secara accrual basis akan dilakukan apabila bank melihat bahwa debitur memiliki kelancaran pembayaran yang betul-betul baik.

e. Pendapatan Sebelum Pajak (*Earnings Before Tax*)

Pendapatan sebelum pajak (*earnings before tax*) merupakan laba yang terlihat atau yang diperoleh sebelum dikurangkan dengan pajak.

f. Pajak (*Tax*)

Pajak (*tax*) merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atas penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang pemberian atau sumber-sumber lainnya untuk memberikan pemasukan bagi barang umum (publik).

g. Laba Setelah Pajak (*Earnings After Tax*)

Laba setelah pajak (*earnings after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut juga dengan net income (laba bersih), atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*).

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23), isi laporan laba-rugi terdiri dari:

- Penjualan Bersih (*Net Sales*), hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan
- Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*), Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
 - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - c. Biaya pabrik (*Biaya overhead*)
- Laba kotor (*Gross profit*), Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan
- Biaya Usaha (*Operating Expenses*), Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).
- Laba Usaha (*Operating Profit*), Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*), Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*), Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba ditahan (*Retained Earning*), Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

Menurut Hery (2019: 157) pencadangan atas laba ditahan mungkin dilakukan, di antaranya adalah untuk membeli treasury stock, melunasi utang jangka panjang, melakukan perluasan pabrik, membuka kantor cabang baru, mengatasi ketidakpastian, dan lain sebagainya. Selain dicatat dalam jurnal, peristiwa pencadangan laba ditahan ini juga pada umumnya perlu diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Jurnal akan dibuat dengan cara mendebet akun laba ditahan yang tidak dicadangkan (*unappropriated retained earnings*) dan mengkredit akun laba ditahan yang dicadangkan (*appropriated retained earnings*).

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Siti Rahmi (2021:30), laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan prive dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Karyawati P (2013: 98) laporan arus kas (*cash flow*) adalah:

“Laporan arus kas (*cash flow*) merupakan laporan yang menyajikan aliran kas (*cash flow*), baik aliran masuk maupun aliran keluar secara sistematis, berdasarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Laporan arus kas menguraikan sumber dan penggunaan kas, untuk menunjukkan pengelolaan kas dalam perusahaan. Menyajikan arus kas secara sistematis diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat menilai baik tidaknya pengelolaan perusahaan. Pengelolaan dan penempatan kas dengan baik menentukan masa depan perusahaan. Laporan arus kas merupakan salah satu rujukan untuk menganalisa keberhasilan perusahaan di masa depan”.

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:24), secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:

- **Aktivitas Operasi**, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.

Menurut Kuswandi (2008:141), Arus Kas Bersih = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar.

Menurut Nurliah (2023:142), Arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

- a. Penerimaan dari langganan.
 - b. Penerimaan dari piutang bunga.
 - c. Penerimaan dividen.
 - d. Penerimaan *refund* dari *supplier*.
- Arus Kas keluar misalnya berasal dari:
- a. Kas yang di bayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
 - b. Bunga yang di bayar atas utang perusahaan.
 - c. Pembayaran pajak penghasilan.

- d. Pembayaran gaji.
- **Aktivitas Investasi**, adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan *financial*. Contoh investasi adalah pembelian berupa *asset financial* seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Kesamaan dari semua investasi di atas adalah harapan untuk memperoleh keuntungan (*gain*) di kemudian hari.
 - **Aktivitas Pembiayaan**, yaitu metode yang di gunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi, setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan risiko.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

adalah informasi tambahan yang harus di berikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. (Hendra Harmain, [dkk 2019:27]).

2.1.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraph ke 9 (revisi 2018) adalah: “... untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi Sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Menurut Fahmi (2015: 5) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka yang moneter.

Sedangkan menurut Kasmir (2017: 10) tujuan laporan pembuatan atau penyusuna laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

2.1.2.5 Pihak-Pihak yang Membutuhkan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi bisnis antara perusahaan dengan pihak lain. Adapun pihak-pihak tersebut menurut Siswanti, dkk (2022: 50)

1. "Manajemen
Bagi manajemen informasi keuangan dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan pada waktu lampau, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan penyusunan strategi di masa yang akan datang atau periode berikutnya. Manajemen juga dapat menggunakan laporan keuangan untuk membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu, maupun membandingkan dengan industry lain terutama adalah pesaing, guna mengukur posisi perusahaan dibandingkan pesaingnya.
2. Pemilik Perusahaan

Pemilik perusahaan membutuhkan informasi laporan keuangan, untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan yang dapat diukur dengan perkembangan usaha, pencapaian laba perusahaan, pertumbuhan asset, serta modal, bagi pemilik yang lebih penting adalah tercapainya keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Kreditur

Bagi kreditur laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan kredit atau pinjaman dan bunganya pada saat jatuh tempo. Hal ini untuk menjaga keamanan asset kreditur yang dipinjamkan kepada perusahaan.

4. Calon Investor

Calon investor merupakan pihak yang menjadi target perusahaan dalam penanaman modal atau investasi. Bagi investor untuk mengambil keputusan berinvestasi perlu adanya informasi tentang kondisi keuangan perusahaan, termasuk kemampuan perusahaan dalam memberikan tingkat kembalian investasi yang diharapkan.

5. Pemerintah atau Dirjen Pajak

Dirjen pajak membutuhkan laporan keuangan sebagai informasi yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kas negara.

6. Karyawan

Karyawan dapat menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam menghitung besarnya upah dan gaji yang layak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain itu, dengan laporan keuangan tersebut, karyawan dapat memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang, untuk memastikan bahwa perusahaan masih dalam kondisi aman, dan mampu memberikan-memberikan kompensasi sesuai dengan perubahan yang terjadi”.

2.1.3 Analisis Laporan Keuangan

2.1.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Definisi analisis laporan keuangan menurut Kariyoto (2017: 21) “... suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungki mengenai kondisi performace perusahaan pada masa yang akan datang”.

Analisis laporan keuangan menurut Subramanyam (2014: 4) adalah:

“Financial statement analysis is the application of analytical tools and techniques to general-purpose financial statements and related data to derive estimates and inferences useful in business analysis. Financial statement analysis reduces reliance on hunches, guesses, and intuition for business decisions”.

Sedangkan menurut Hutabarat (2021: 15) analisis laporan keuangan adalah:

“... untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kelemahan atau kekuatan kinerja keuangan perusahaan tersebut yaitu dengan cara memproses laporan keuangan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, menurut Kariyoto (2017: 22) tujuan-tujuan tersebut di antaranya adalah:

1. Alat *screening* awal dalam memilih alternatif investasi atau merger.
2. Alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang.
3. Sebagai proses diagnostic terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya.
4. Alat evaluasi terhadap manajemen.
5. Mengurangi ketergantungan para pengambilan keputusan pada dugaan murni, tekaan, dan intuisi.
6. Mengurangi dan mempersempit lingkup ketidakpastian yang tidak bisa diletakkan pada setiap proses pengambilan keputusan
7. Memberikan dasar yang layak dan sistematis dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan.

Sedangkan menurut Kasmir (2017: 68) ada beberapa tujuan dan manfaat

analisis laporan keuangan yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui Langkah-langkah perbikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.1.4 Saham

Menurut Sapto (2006) dalam Nugroho (2022: 73) saham adalah "Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan"

Adapun menurut Fahmi (2015: 53) ada beberapa pengertian saham adalah:

- 1) Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
- 2) Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
- 3) Persediaan yang siap untuk dijual.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Saham

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preference stock*). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing- masing (Fahmi, 2015: 54).

1. **Common Stock (saham biasa)**

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (*vote*) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (*claim*) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

Common stock ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) *Blue Chip-Stock* (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan management yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh blue chip.
- b) *Growth Stock*. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.
- c) *Defensive Stock* (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori *food and beverage*, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.
- d) *Cyclical Stock*. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan *real estate*. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.
- e) *Seasonal Stock*. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.
- f) *Speculative Stock*. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.

2. **Preferred Stock (saham istimewa)**

Preferred Stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

2.1.4.2 Harga Saham

Menurut Nugroho (2022: 79) harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham

Adapun Menurut Jogiyanto (2008:167) harga saham adalah "Harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal".

2.1.4.3 Jenis-Jenis Harga Saham

Adapun jenis-jenis harga saham menurut Widoatmojo (2005: 54) adalah sebagai berikut:

1. "Harga Nominal.
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
2. Harga Perdana
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (underwrite) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.
3. Harga Pasar
Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di

pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga Pembukaan
 Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.
5. Harga Penutupan
 Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau ini yang terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar. Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.
6. Harga Tertinggi
 Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama.
7. Harga Terendah
 Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.
8. Harga Rata-Rata
 Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.”

2.1.4.4 Valuasi Saham Model

Valuasi saham menurut Tandelilin (2010: 301) dalam Nugroho, dkk (2022: 83) terdiri dari tiga jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik. Sebelum memberikan penilaian terhadap saham perlu dibedakan terlebih dahulu antara nilai (*value*) dan harga (*price*), yang dimaksud dengan nilai adalah nilai intrinsik (*intrinsic value*), sedangkan harga diartikan sebagai harga pasar (*market value*). Berikut ini beberapa nilai berhubungan dengan saham yaitu:

1. Nilai Buku (*Book Value*)
 Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.
2. Nilai Pasar (*Market Value*).
 Nilai pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.
3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*).
 Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

2.1.5 Penyusutan (Depresiasi)

Pengertian depresiasi atau penyusutan menurut Giri (2012:247), adalah: “... proses sistematis dan rasional untuk mengalokasikan cost atau biaya aset selama taksiran manfaat aset tetap dan pembebanannya pada periode yang menerima manfaat aset tetap”.

Sementara itu, pengertian depresiasi atau penyusutan menurut PSAK No. 16 Revisi 2011 adalah: “... alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aet selama umur manfaatnya”.

Sedangkan, menurut Rudianto (2012: 260), mendefinisikan depresiasi atau penyusutan adalah: “... pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut”.

2.1.5.1 Faktor yang Menentukan Beban Penyusutan

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana

manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan (Atichasari, 2023: 45), yaitu berikut ini:

1. Harga Perolehan (*Costs*)

Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.

2. Umur Ekonomis (*Useful-Life*)

Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
- b. Keusangan karena waktu.
- c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.

3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (*Salvage Value*)

Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (*junk value*) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.

4. Metode Penyusutan

Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan

sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

4.1.5.2 Macam-Macam Metode Depresiasi

Menurut Atichasari (2023: 48) metode depresiasi merupakan suatu yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu diketahui (Atichasari, 2023: 49), yaitu:

1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas). Metode Aktivitas Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode aktivitas (*activity method*). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut
2. Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*)
Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai) aktiva tetap yang bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu
3. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun.
Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasiyang menurun ada 2, yaitu berikut ini.

- a. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Year's Digits Method*)
Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut
- b. Metode persentase tetap dari nilai buku (Metode Saldo yang Menurun/*Declining Balance Method*)
Metode saldo yang menurun dalam metode saldo yang menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun.

2.1.5.3 Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tidak berwujud yang dapat disusut-kan atau didepresiasi selama masa manfaat. Masa manfaat memiliki pengertian sebagai periode waktu aset tidak berwujud diperkirakan akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan (Arifin, 2009: 149).

Aset tetap tidak berwujud merupakan aset tidak lancar (*noncurrent assets*) yang tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. Penyajiannya dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dan klasifikasi aset yang lain. Ciri paling menonjol aset jenis ini adalah tingkat ketidakpastian nilai dan manfaat di kemudian hari. Contoh aset tetap tidak berwujud di antaranya adalah *goodwill*, hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba (Arifin, 2009: 148).

2.1.5.4 Depleksi

Selain aset tidak berwujud yang telah dibahas di atas, perusahaan juga dapat memperoleh aset untuk mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan atau penggalian. Contoh hak penguasaan hutan, hak untuk menambang minyak dan gas bumi. Biaya untuk memperoleh hak tersebut setiap periode akan berkurang sebagai akibat pemanfaatan atau penggalian sumber daya. Pembebanan biaya semacam ini disebut dengan istilah depleksi. Depleksi pada dasarnya dapat disamakan dengan penyusutan pada aset tetap (Arifin, 2009: 149).

2.1.6 Landasan Teori

2.1.6.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif atau dorongan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraannya. Teori ini didasarkan pada bagian bahwa manajer, pemegang saham adalah rasional dan mereka berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, yang secara langsung terkait dengan kemakmuran mereka (Nugroho dan Mutmainah, 2012)

Teori akuntansi positif memprediksi bahwa manajer mempunyai kecenderungan menaikkan laba untuk menyembunyikan kinerja buruk. Kecenderungan manajer untuk menaikkan laba dapat didorong oleh adanya empat masalah pengontrakan yaitu informasi asimetrik, masa kerja terbatas manajer, kewajiban terbatas manajer, dan asimetri pembayaran (*asymmetric payoff*) (Watts, 2003 dalam Nugroho, 2012). Pemegang saham dan kreditur berusaha menghindari kelebihan pembayaran kepada manajer dengan meminta penyelenggaraan akuntansi yang konservatif (Watts, 2003 dalam Nugroho 2012). Oleh karena itu

dapat disimpulkan bahwa manajer cenderung menyelenggarakan akuntansi liberal, tetapi kreditur (dalam kontrak utang) dan pemegang saham (dalam kontrak kompensasi) cenderung meminta manajer menyelenggarakan akuntansi konservatif.

Teori akuntansi positif dalam Chariri dan Ghozali (2007) dalam Hoesada (2022: 175) menyatakan bahwa ada tiga hubungan keagenan:

1. Antara manajemen dengan pemilik (pemegang saham) Apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding dengan investor lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif. Hal ini dikarenakan prinsipal (pemegang saham) menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan karena agen (manajer) ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk memperbesar perusahaan. Dengan metode konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. Aset diakui dengan nilai terendah, ini berarti nilai pasar lebih besar dari pada nilai buku.
2. Antara manajemen dengan kreditur Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada

tanggal jatuh tempo. Dengan kata lain kreditur beranggapan akan mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayar. Kreditur dengan melihat laba yang tinggi cenderung akan mudah dalam memberikan pinjaman.

3. Antara manajemen dengan pemerintah Manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi. Misalnya harus menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan harus membayar pajak yang lebih tinggi.

2.1.7 *Financial distress*

2.1.7.1 Pengertian *Financial distress*

Pengertian *financial distress* menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2015: 158) adalah: "... tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi".

Menurut Wruck (1990) dalam Saad dan Abdillah (2019) *financial distress* terjadi ketika arus kas perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang ditanggungnya.

Sedangkan menurut Hutabarat (2020: 27), *financial distress* adalah: "... tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Dan jika terjadi kesulitan keuangan maka itu merupakan kesulitan likuiditas yang bisa menjadi awal dari kebangkrutan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa yang dimaksud *financial distress* adalah kondisi keuangan suatu entitas yang mengalami suatu masalah likuiditas, tetapi bisa berkembang menjadi lebih buruk apabila kondisi tersebut tidak cepat diatasi atau dengan kata lain kondisi keuangan perusahaan sedang dalam kondisi tidak sehat, dan jika kondisi tersebut tidak cepat diatasi maka ini dapat berakibat kebangkrutan usaha.

2.1.7.2 Kategori *Financial distress*

Menurut Fahmi (2015: 159), kesulitan keuangan dikategorikan ke dalam berbagai golongan, yaitu sebagai berikut:

“Untuk persoalan *financial distress* secara umum ada 4 (empat) kategori pernggolongan yang dibuat, yaitu:

1. Pertama, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut dan pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
2. Kedua, *financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan

berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan *merger* (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.

3. Ketiga, *financial distress* kategori C atau sedang. Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal.
4. Keempat, *financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakannya keputusan yang kurang tepat. Kondisi ini umumnya bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini dapat segera diatasi.

2.1.7.3 Penyebab *Financial distress*

Menurut Fahmi (2015: 158) faktor penyebab terjadinya *financial distress* adalah:

“Penyebabnya dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bisa timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan 2 (dua) metode, yaitu *Stock-based insolvency* dan *Flow-based insolvency* ditunjukkan oleh kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negative dari neraca perusahaan (*negative net wort*), sedangkan

Flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi arus kas operasi (*operating cash flow*) yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban lancar perusahaan.”

Menurut Lizal (2002) dalam Dwijayanti (2010 :197) mengelompokkan penyebab kesulitan, yang disebut dengan Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Terdapat 3 alasan utama mengapa perusahaan bisa mengalami *financial distress* dan kemudian bangkrut, yaitu:

1. *Neoclassical model*

Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasikan sumber daya (*asset*) yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

2. *Financial Model*

Pencampuran asset benar tetapi struktur keuangan salah dengan *liquidity constrains*. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka Panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka pendek.

3. *Corporate governance model*

Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran asset dan struktur keuangan yang benar tapi di kelola dengan buruk. Ketidakefisienan dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.

Sedangkan menurut Fatmawati (2017) *financial distress* dapat terjadi karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Faktor internal perusahaan meliputi:

1. Kesulitan arus kas perusahaan dapat terjadi karena kesalahan manajemen dalam mengelolah arus kas untuk pembayaran aktivitas perusahaan dimana dapat memperburuk kondisi keuangan perusahaan.
2. Besarnya jumlah hutang adalah hutang perusahaan timbul karena untuk menutupi biaya perusahaan, yang terjadi akibatnya operasi perusahaan akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk mengembalikan hutang tersebut di masa depan.
3. Kerugian dari kegiatan operasi perusahaan selama beberapa tahun merupakan suatu akibat dari aktivitas perusahaan yang perlu diatasi dengan kebijakan tepat dalam jangka waktu singkat, kerugian operasi perusahaan dapat mengakibatkan arus kas negative.

Dari kutipan-kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab

financial distress dapat terjadi dari aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Tetapi pada dasarnya kegagalan dari suatu bisnis atau terjadinya kondisi *financial distress* disebabkan oleh kombinasi dari berbagai penyebab diatas.

2.1.7.4 Manfaat *Financial distress*

Menurut Rudianto (2013:253), informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini, yaitu:

1. “Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan diminimalkan. Maka pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan berupa merger atau restrukturisasi keuangan.
2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)
Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman perusahaan tersebut.
3. Investor

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka calon investor perusahaan itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

4. Pemerintah

Pada beberapa sektor usaha, Lembaga pemerintah bertanggung jawab menawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya Tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

5. Akuntan Publik

Akuntan public perlu menilai potensi kebangkrutan badan usahayang sedang diaudit, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* perusahaan tersebut”.

Sedangkan menurut Saryono (2010:114), prediksi mengenai perusahaan

yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) yang kemudian mengalami kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor maupun manajemen.

2.1.7.5 Ciri-ciri *Financial distress*

Menurut Lesmana dan Surjanto (2004: 184), tanda-tanda yang dapat dilihat terhadap sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan dalam bisnisnya (*financial distress*), antara lain sebagai berikut:

- a. Penjualan atau pendapatan yang mengalami penurunan secara signifikan
- b. Penurunan laba berturut-turut lebih dari satu tahun
- c. Penurunan total aktiva
- d. Harga pasar saham menurun secara signifikan

- e. Kemungkinan gagal yang besar dalam industry, atau industry dengan resiko yang tinggi.
- f. *Young Company*, perusahaan berusia muda pada umumnya mengalami kesulitan bertahun-tahun awal operasinya, sehingga kalau tidak didukung sumber permodalan yang kuat akan dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius dan berakhir dengan kebangkrutan
- g. Pemotongan yang signifikan dalam dividen.

2.1.7.6 Metode Pengukuran *Financial distress*

2.1.7.6.1 Altman *Z-score*

Menurut Fahmi (2015: 158), pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang *bankruptcy*, salah satu yang dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model Altman ini lebih umum disebut dengan Altman *Z-score*.

Menurut Rudianto (2013: 254), analisis *Z-score* adalah metode untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap berbagai jenis perusahaan, Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang.

Sebanyak tiga formula yang digunakan dalam model kebangkrutan Altman seperti ditunjukkan di atas. Untuk perusahaan manufaktur formula dibagi menjadi dua yaitu public dan swasta. Sementara memprediksi kebangkrutan industri jasa seperti industri perbankan Altman memperkenalkan model perusahaan jasa secara terpisah (Altman (2000) dalam Maharrani dan Sinta, 2018). Dalam *Z-score* modifikasi ini Altman Mengeliminasi variable X_5 (*sales to total assets*), karena rasio ini sangat bervariasi pada industri dengan ukuran aset yang berbeda-beda (Ramadhani dan Lukviarman, 2009:20).

Rudianto (2013:254) menyatakan perkembangan rumusan yang dikembangkan oleh Altman sebagai berikut:

“Rumus *Z-score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1968. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2 (X_1) + 1,4 (X_2) + 3,3 (X_3) + 0,6 (X_4) + 1,0 (X_5)$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja / Total Aset

X_2 = Laba Ditahan / Total Aset

X_3 = EBIT / Total Aset

X_4 = Nilai Pasar Saham / Total Hutang

X_5 = Penjualan / Total Aset

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 (lima) unsur yang berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Berikut definisi dari diskriminasi Z (*zeta*) (Rudianto, 2013:255)

1. Rasio X_1 (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan asset likuid bersih dengan total asset. Asset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai asset lancar dikurangi total kewajiban lancar (asset-utang lancar). Umumnya, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan menurun lebih cepat daripada total asset sehingga menyebabkan rasio ini turun.

Rasio ini dapat dicari dengan rumus:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

2. Rasio X_2 (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini menunjukkan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi lama selama perusahaan beroperasi:

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

3. Rasio X_3 (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earnings Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$X_2 = \frac{EBIT}{Total\ Aset}$$

4. Rasio X_4 (Nilai Saham : Total Aset)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (*Debt to Equity Ratio*). Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan yang dikalikan dengan harga pasar saham per lembarnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X_4 = \frac{Nilai\ saham}{Total\ utang}$$

5. Rasio X_5 (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Rudianto (2013: 256), Altman menyatakan bahwa jika perusahaan memiliki indeks kebangkrutan 2,99 atau di atasnya, maka perusahaan tidak termasuk yang dikategorikan akan mengalami kebangkrutan, sedangkan perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan 1,81 atau dibawahnya, perusahaan tersebut termasuk kategori bangkrut.

Jika nilai Z diatas 0,862, maka perusahaan diklasifikasikan masih dalam kategori sehat. Jika nilai Z di bawah 0,862, maka perusahaan dinilai sedang berada dalam bahaya kebangkrutan (Rudianto, 2013: 263).

1. $Z > 0,862$ = Perusahaan sehat
2. $Z \leq 0,862$ = Perusahaan potensial bangkrut

Jika nilai $Z < 1,1$ maka perusahaan diklasifikasikan mengalami *financial distress*. Jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ maka perusahaan berada dalam *grey area* dan pada kondisi diindikasikan sebagai sinyal menuju *financial distress*, sehingga perusahaan harus segera memperbaiki kondisi keuangannya agar tidak terjadi *financial distress*. Sedangkan, jika nilai $Z > 2,6$ maka perusahaan diprediksi tidak mengalami *financial distress* di masa depan. (Hardiyanti, 2022).

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak *go public*. Karena itu rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Hasil

penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-score* yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z = 0,717 (X_1) + 0,84 (X_2) + 3,107 (X_3) + 0,420 (X_4) + 0,998 (X_5)$$

Dimana:

X_1 = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

X_2 = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

X_3 = Pendapatan Sebelum Pajak dan Bunga dibagi dengan Total Aset

X_4 = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Hutang

X_5 = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Rumus *Z-score* tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan non *go public*. Untuk itu Altman Kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus *Z-score* dapat digunakan dalam perusahaan *go public* dan no *go public*.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1. Jika nilai $Z > 2,9$ = Perusahaan masuk kategori tidak bangkrut

2. Jika $1,23 \leq Z < 2,9$ = Perusahaan masuk wilayah *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan)
3. Jika $Z < 1,23$ = Perusahaan masuk kategori bangkrut

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang *go public* maupun yang tidak. Rumus *Z-score* terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan dinegara berkembang seperti Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56 (X_1) + 3,26 (X_2) + 6,72 (X_3) + 1,05 (X_4)$$

Dimana:

X_1 = Modal Kerja / Total Aset

X_2 = Laba Ditahan / Total Aset

X_3 = EBIT / Total Aset

X_4 = Nilai buku Ekuitas/Nilai Buku Utang

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan.

1. Jika nilai $Z > 2,60$ = Perusahaan masuk kategori tidak bangkrut
2. Jika $1,10 \leq Z \leq 2,60$ = Perusahaan masuk wilayah grey area (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan)
3. Jika $Z < 1,10$ = Perusahaan masuk kategori bangkrut

2.1.7.6.2 Model Zmijewski (*X-Score*)

Menurut Rudianto (2013: 264) Mark Zmijewski juga melakukan penelitian untuk memprediksi keberlangsungan hidup sebuah badan usaha. Dari hasil penelitian Zmijewski menghasilkan rumus yang dapat digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan yang disebut sebagai Zmijewski Score.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut (Rudianto, 2013: 264):

$$Z = 4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 + 0,004 X_3$$

Dimana:

$$X_1 = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Kriteria yang digunakan dalam metode ini adalah semakin besar hasil yang didapat dengan rumus tersebut berarti semakin besar pula potensi kebangkrutan. Dengan kata lain, jika perhitungan dengan menggunakan metode Zmijewski Score menghasilkan nilai positif, maka perusahaan berpotensi bangkrut. Semakin besar nilai positifnya, semakin besar pula potensi kebangkrutannya. Sebaliknya, jika perhitungan dengan menggunakan metode Zmijewski Score menghasilkan nilai negative, maka perusahaan tidak berpotensi bangkrut.

2.1.7.6.3 Analisis *Springate Score*

Menurut Rudianto (2013: 262) *Springate Score* adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi, dengan *Springate Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Springate Score dihasilkan oleh Gordon L. V. Springate pada tahun 1978 sebagai pengembangan dari Altman *Z-score*. Model Springate adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminate analysis (MDA). Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik (Rudianto (2013:262)).

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Springate Score* untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut (Rudianto, 2013:262):

$$Z = 1,03 X_1 + 3,07 X_2 + 0,66 X_3 + 0,4X_4$$

Dimana:

$$X_1 = \frac{\text{Modal kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBT}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun salah satu komponen untuk menentukan *financial distress* dalam rumus Altman *Z-score* pertama adalah modal kerja (komponen lainnya telah dijelaskan pada uraian diatas).

Menurut Kasmir (2017: 250) pengertian modal kerja adalah:

“... modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya.”

Dalam praktiknya secara umum, modal kerja perusahaan dibagi ke dalam dua jenis (Kasmir, 2017:251) yaitu:

a) Modal kerja kotor (*gross working capital*);

Modal kerja kotor (*gross working capital*) adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nilai total komponen aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan.

b) Modal kerja bersih (*net working capital*).

Modal kerja bersih (*net working capital*) merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi denganseluruh total kewajiban lancar (utang jangka pendek). Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek (satu tahun), utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Pengertian ini sejalan dengan konsep modal kerja yang sering digunakan.

Jenis-jenis Modal Kerja menurut (Ahmad Bairizki, 2022):

1. Modal kerja permanen, modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di perusahaan agar dapat menjalankan setiap kegiatan dalam satu periode akuntansi.
 - a. Modal kerja primer (*primary working capital*), modal kerja yang minimal harus ada dalam setiap perusahaan agar fungsinya untuk menjamin perusahaan dapat beroperasi.

- b. Modal kerja normal (*normal working capital*), modal kerja yang wajib dan harus ada agar perusahaan bisa beroperasi dengan tingkat produksi yang normal.
2. Modal kerja variabel (*variable working capital*), modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode.
 - a. Modal kerja musiman (*seasonal working capital*), yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh perubahan musim.
 - b. Modal kerja darurat (*emergency working capital*), yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang penyebabnya tidak diketahui sebelumnya (misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, buruh mogok, dan sebagainya).
 - c. Modal kerja siklus (*cyclis working capital*), yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah disebabkan oleh permintaan produk.

2.1.8 Insentif Pajak

2.1.8.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat.Soemitro,S.H. dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra

prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Rifhi Siddiq) dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.8.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (cregulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.8.3 Jenis Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:16), ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. Kedua jenis pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.8.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:19), secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga cara yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya modal wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah

- a. pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. wajib pajak bersifat pasif, dan
- c. hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. *Withholding Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.1.8.5 Tarif Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2019:39), terdapat empat jenis tarif pajak yakni:

1. Tarif Pajak Tetap
Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka tertentu yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.
2. Tarif Pajak Secara Proporsional
Tarif Pajak ini sering juga disebut sebagai Tarif Pajak Sebanding, yakni suatu tarif pajak berupa suatu persentase tertentu yang tetap terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak Secara Progresif
Di beberapa literatur tarif pajak ini disebut juga tarif pajak meningkat, yaitu berupa tarif pajak yang nilai persentasenya akan meningkat apabila besarnya dasar pengenaan pajaknya meningkat (semakin besar). Tarif pajak Progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:
 - a) Tarif Pajak Progresif Progresif
Kondisi dimana semakin meningkat dasar pengenaan pajaknya akan semakin meningkat persentase tarif pajaknya dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat
 - b) Tarif Pajak Progresif Tetap/Proporsional
Tarif ini disebut pula sebagai Tarif Pajak Progresif Proporsional, dimana tarif ini mengkondisikan adanya peningkatan persentase tertentu pada nilai tarif pajaknya apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Perbedaan dengan tarif pajak progresif-progresif, pada tarif ini peningkatan persentase tarif pajaknya tetap.
 - c) Tarif Pajak Progresif Degresif
Tarif pajak ini mengkondisikan persentasi tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai dasar pengenaan pajaknya, namun peningkatan persentasi tarif banyak yang terjadi bersifat semakin menurun.
4. Tarif Pajak Secara Degresif
Tarif pajak ini disebut pula tarif pajak secara menurun, yakni suatu kondisi dimana persentasi tarif pajak akan semakin menurun apabila nilai dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

2.1.8.6 Beban Pajak Penghasilan

Menurut Dr. Waluyo (2014:215) Beban pajak penghasilan terdiri atas beban pajak kini (dalam tahun berjalan) dan beban pajak tangguhan. PSAK No. 46 memberikan beberapa istilah yang perlu dipahami:

1. Beban pajak (*tax expense*) adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan.
2. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT
3. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak Perusahaan (penghasilan objek pajak - tarif Pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan).
4. Pajak Penghasilan Final adalah pajak penghasilan atas penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri yang bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan objek pajak tarif Pasal 17 sebagai komponen Penghasilan Kena Pajak yang dikenakan pajak tidak bersifat final. Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak tersendiri dan bersifat final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, yang berasal dari transaksi, kegiatan, atau usaha tertentu (menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Pajak Penghasilan).
5. Laba Akuntansi adalah laba atau rugi bersih dalam suatu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak laba (rugi) sebelum pajak.
6. Laba atau Rugi Fiskal (*Taxable Income or Loss*) atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba atau rugi dalam suatu tahun pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak berjalan.
7. Beban (Penghasilan) Pajak Tangguhan adalah jumlah beban penghasilan Pajak Tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset Pajak Tangguhan.
8. Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) adalah jumlah beban Pajak Penghasilan Terutang untuk periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*)
9. Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Assets*) adalah jumlah Pajak Penghasilan yang terpulihkan (*recovered*) pada periode mendatang sebagai

akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasikan.

10. Perbedaan Temporer Kena Pajak (*Taxable Temporary Differences*) adalah perbedaan temporer yang dapat menimbulkan jumlah kena pajak (*taxable amounts*) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang saat tercatat aset terpulihkan atau nilai tercatat kewajiban dilunas.

Pajak kini merupakan beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak. Dengan memperhatikan sifat penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya tidak bersifat final dan Pajak Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final (perhatikan Pasal 4 ayat (2) UU PPh). PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan atau wajib pajak untuk memperlakukan konsekuensi pajak dari suatu transaksi keuangan sama dengan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut (Dr. Waluyo, 2014:216).

2.1.8.7 Definisi Insentif Pajak

Menurut Suandy (2006: 16) insentif pajak adalah "... suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu.

Menurut Sihotang dan Sinabutar (2020) dalam Rizki Krisna Yulia (2023) insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa peurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi

beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008).

Sedangkan menurut Raharja dan Sandra (2013) dalam Harini (2020) insentif pajak adalah: "... suatu perangsang yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak.

Bedasarkan pengertian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa insentif pajak merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan upaya mengurangi beban pajak agar dapat meningkatkan laba yang dihasilkan dengan tujuan menarik investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan atau sektor yang dipilih

2.1.8.8 Jenis Insentif Pajak

Menurut Suandy (2006:17) menjelaskan secara umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak, yaitu:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak
Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Namun perlu dilakukan kehati-hatian dalam merencanakan penanaman investasinya. Pertama harus diketahui sampai berapa lama pembebasan pajak (*tax holiday*) diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil.
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak
Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*) biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Yang paling umum adalah dalam bentuk penyusutan dipercepat yang disebut *initial allowance*; atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance*, yakni sejumlah tertentu biaya yang bisa langsung dikurangkan; atau juga bisa dalam bentuk *annual allowance*, yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai aset tersebut rusak.
- c. Pengurangan tarif pajak

Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*), biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu.

d. Penangguhan pajak

Penangguhan pajak (*tax deferral*), biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu.

2.1.8.9 Manfaat Insentif Pajak

Beberapa negara berkembang memberikan penawaran insentif pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan investasi atau penanaman modal. Insentif tersebut sebagian besar ditujukan untuk menarik investasi asing dalam bentuk 17 aktivitas produksi dan bukan investasi dalam bentuk aset keuangan. Dengan adanya investasi diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara tersebut. Selain itu, alasan beberapa negara berkembang menawarkan insentif pajak antara lain sebagai penyeimbang dari adanya kelemahan dalam sistem pajak yang berlaku di negara tersebut, untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan dialami oleh investor (dapat dikarenakan infrastruktur yang tidak mendukung), adanya hukum yang berbelit – belit dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, birokrasi yang berlebihan dan administrasi yang lemah baik di sektor pajak maupun sektor lainnya di negara tersebut (Amanda,2012).

2.1.8.10 Pengukuran Insentif Pajak

Menurut Yin dan Cheng (2004) dalam Harini, dkk (2020) insentif pajak diukur menggunakan proksi perencanaan pajak, yaitu:

$$TAXPLAN = \frac{\text{Taruf Pph} \times (PTI - CTE)}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

TAX PLAN : Perencanaan pajak.
 PTI : Laba sebelum pajak
 CTE : Beban pajak kini
 TA : Total Aset

Menurut Husnul Khotimah (2014) Insentif Pajak diukur menggunakan:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Current Tax Expense = Beban pajak kini
 Net Income Before Tax = Laba Sebelum Pajak

Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung insentif pajak adalah menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* menurut Husnul Khotimah (2014) sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Net Income Before Tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

Current Tax Expense = Beban pajak kini
 Net Income Before Tax = Laba Sebelum Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25% perusahaan akan diduga mendapatkan insentif pajak jika nilai *Effective Tax Rate*

(ETR) \leq 20% dan jika *nilai Effective Tax Rate* (ETR) $>$ 20%, maka perusahaan tidak mendapatkan insentif pajak.

Adapun PP Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 2(b) Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%, perusahaan diduga mendapatkan insentif pajak jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) \leq 19% dan jika nilai *Effective Tax Rate* (ETR) $>$ 19%, maka perusahaan tidak mendapatkan insentif pajak. Penulis juga menerapkan syarat sesuai dengan peraturan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2020 Pasal 3.

2.1.8.11 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)

di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
 - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.8.12 Undang-undang Nomor & Tahun 2021

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
(2a). Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan	30% (tiga puluh persen)

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam pen5rusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2a) Dihapus.
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:
- berbentuk perseroan terbuka;
 - dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari

- dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
 7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.1.8.13 Peraturan Pemerintah PP Nomor 30 Tahun 2020

PP Nomor 30 Tahun 2020 Pasal 2 Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. 20% (dua puluh persen yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022
- Dalam Pasal 3:
1. Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen), dan
 - c. memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 2. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
 - b. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
 - d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
 3. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak termasuk:

- a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/atau
 - b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.
4. Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dalam Pasal 4:

Dalam hal tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam Pasal 5 :

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Pasal 6 :

Pasal 6 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyampaian:
a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d; dan daftar Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Pasal 7 :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: pemenuhan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dari awal Tahun Pajak 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka; dan b. atas Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang menyampaikan 1 SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya; dan/atau 2. pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya, tetap berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Dalam Pasal 8 :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57251, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Pasal 9 :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5465) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57251', dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2.1.9 Konservatisme Akuntansi

2.1.9.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi

Pengertian Konservatisme Akuntansi menurut Juanda (2007) dalam Enni Savitri (2016: 23) adalah "... prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya, yang menyebabkan laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*)".

Menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:23), konservatisme akuntansi sebagai pengakuan awal biaya rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Menurut Godfrey (2010) dalam Rasmon Safrizal (2022) Menyatakan bahwa konservatisme akuntansi mencatat beban, kerugian dan kewajiban secepat mungkin, namun mencatat pendapatan, keuntungan dan aset harus didukung dengan bukti yang lebih substansial sebelum dilakukannya pencatatan.

Sedangkan menurut Watts (2003) dalam Savitri (2016: 22) konservatisme akuntansi adalah: "... prinsip kehati-hatian dalam laporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan labaserta segera mengakui yang terjadi".

Berdasarkan beberapa pengertian konservatisme akuntansi di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi merupakan tindakan kehati-hatian dalam mengakui pendapatan dan secepat mungkin mengakui beban, kewajiban dan kerugian.

2.1.9.2 Jenis-Jenis Konservatisme

Menurut Subramanyam (2010: 92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

“Konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi

ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).

2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau *goodwill* apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.”

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

2.1.9.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Di dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang dijalankan masih terdapat beberapa metode akuntansi yang memungkinkan penerapan prinsip konservatisme. Di antaranya PSAK No. 14 tentang persediaan, PSAK No. 16 tentang aset tetap, PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud, dan PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan. Misalnya, persediaan yang disajikan di laporan posisi keuangan mendasarkan pada nilai terendah antara harga perolehan

dan nilai realisasi bersih di dalam penilaiannya sehingga melarang pencatatan aset yang *overstated* dari nilai yang diperoleh kembali. PSAK No. 16 memberikan pilihan di dalam menilai aset tetapnya, yakni cost model atau revaluation model (A'isyah dan Vestari, 2019).

PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tsb akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif di antaranya adalah (Enni Savitri, 2016: 25):

1. PSAK No. 14 (Revisi 2018) tentang persediaan

PSAK No 14 paragraph ke 23 menyediakan biaya persediaan untuk item yang biasanya tidak dapat diganti dengan barang lain (*not ordinary interchangeable*) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi spesifik terhadap biayanya masing-masing.

Pada paragraf 25 dijelaskan mengenai biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 23, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang

memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.

Metode masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau biasa disebut *first in first out* (FIFO) merupakan metode yang optimis jika dibandingkan dengan metode LIFO dan rata-rata tertimbang yang menghasilkan angka laba rebih rendah (Dewi, 2004).

Namun, metode perhitungan biaya persediaan yang diakui di dalam PSAK No. 14 (Revisi 20\018) hanya terdapat dua metode, yaitu MPKP atau FIFO dan rata-rata tertimbang. Jika dilihat dari kedua metode perhitungan biaya persediaan maka metode rata-rata tertimbang merupakan metode yang paling konservatif, karena biaya persediaan akhir lebih kecil yang mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi besar, sehingga laba yang dihasilkan menjadi kecil.

2. PSAK No. 16 (Revisi 2018) tentang Aset Tetap

PSAK No. 16 paragraph 62 menyatakan Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Entitas memilih metode yang paling mencerminkan pola pemakaian yang

diperkirakan atas manfaat ekonomik masa depan aset. Metode tersebut diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola pemakaian manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan aset tersebut.

Metode penyusutan atau amortisasi aktiva tetap atau tak berwujud akan lebih konservatif jika periode penyusutan semakin pendek, dan semakin optimis jika periode penyusutan semakin panjang. Hal tersebut dikarenakan oleh, jika periode penyusutan semakin pendek maka biaya penyusutan menjadi lebih besar sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih kecil (Dewi, 2003).

3. PSAK No. 19 (Revisi 2018) tentang Aset Tidak Berwujud

PSAK No. 19 (revisi 2018) pada paragraph ke 97 menyatakan bahwa jumlah tersusutkan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan cara yang diintensikan oleh manajemen PSAK No. 19 (revisi 2018) pada paragraph ke 98 menjelaskan mengenai berbagai metode amortisasi dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan aset atas dasar yang sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pada pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan dan diterapkan secara

konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan dalam pola konsumsi tersebut.

4. PSAK No. 20 (Revisi 2018) tentang biaya riset dan pengembangan

PSAK No.20 paragraph ke 41 (revisi 2018) yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tsb akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tsb dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tsb memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset.

2.1.9.5 Pengukuran Konservatisme

Terdapat tipe-tipe pengukuran untuk menilai konservatisme akuntansi menurut Watts (2003) dalam Savitri (2016: 45), yaitu *Earning/ Stock Return Relation Measure*, *Earning/ Accrual Measures*, *Net Asset Measure*. Berbagai peneliti telah mengajukan berbagai metode pengukuran konservatisme. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watts 2003:

1. *Earning/ Stock Return Relation Measure*

Menurut Wibowo (2002) dalam Widya (2004), tingkat konservatisme akuntansi dapat diukur dengan meregresi laba dan *return* melalui persamaan sebagai berikut:

$$EPS_{it} = \alpha + \alpha R_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_0 DR_{it} \times R_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

EPS_{it} = Laba per lembar saham perusahaan I tahun t

R_{it} = *Return* saham perusahaan I tahun t

DR_{it} = Variabel dummy dengan nilai 1 jika $R_{it} < 0$ (proksi kabar buruk) dan 0 jika $R_{it} > 0$ (proksi kabar baik)

α_0 = Intersep

α_1 = Koefisien variable dummy jenis periode

β_0 = Koefisien (slop) regresi

β_1 = Koefisien variable interaksi *return* dan jenis periode

e_{it} = *Error terms*

Jika koefisien β_1 memiliki tanda positif dan secara signifikan berbeda dengan nol maka terjadi konservatisme laba pada perusahaan.

2. Earning / Accrual Measures

Dwiputro (2009) dalam Savitri (2016: 46) tulisannya menjelaskan bahwa Givoly dan Hyan memfokuskan efek konservatisme pada laporan laba rugi selama beberapa tahun. Mereka berpendapat bahwa konservatisme menghasilkan akrual negatif yang terus menerus. Akrual yang dimaksud adalah perbedaan antara laba bersih sebelum depresiasi/amortisasi dan arus kas kegiatan operasi. Semakin besar akrual negatif maka akan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan. Hal ini dilandasi oleh teori bahwa

konservatisme menunda pengakuan pendapatan dan mempercepat penggunaan biaya. Dengan begitu, laporan laba rugi yang konservatisme akan menunda pengakuan pendapatan yang belum terealisasi dan biaya yang terjadi pada periode tersebut dibandingkan dan dijadikan cadangan pada neraca. Sebaliknya laporan keuangan yang optimis akan cenderung memiliki laba bersih yang lebih tinggi dibandingkan arus kas operasi sehingga akrual yang dihasilkan adalah positif.

Perhitungan total akrual yang mengacu pada penelitian Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:52). Variabel pengukuran konservatisme akuntansi ini diberi istilah tingkat konservatisme akuntansi dan akan bernilai negative jika perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Agar tingkat konservatisme akuntansi perusahaan mencerminkan nilai makin tinggi makin konservatif, maka hasil perhitungan tingkat konservatisme dikalikan dengan minus satu (-1) (Ratnadi, dkk, 2013 dalam Aryani dan Muliati 2020) sebagai berikut :

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{TA}}$$

Keterangan:

CONACC: *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO: *Operating profit of current year*

DEP: *Depreciation of fixed assets of current year*

CFO: *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

TA: *Total Assets*.

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Enni Savitri 2016:47)

Apabila hasil bertanda positif, maka persusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negative, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi (Sumiarti dan Wirama, 2016).

3. *Net Asset Measure*

Untuk menghitung *net asset measure*, Widya (2004) menggunakan proksi rasio *market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus yang digunakan oleh Gitman (2010: 70) dalam Wulianti (2013), untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book (M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price per share of common stock}}{\text{Book value per share of common stock}}$$

Perusahaan yang memiliki *market to book ratio* lebih dari 1 menunjukkan perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi (Brilianti, 2013).

2.1.9.5.1 Pengertian Net Income

Menurut Reeve dkk yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2009: 23), bahwa *net income* (laba bersih) adalah: "... jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba bersih (*net income* atau *net profit*)".

Menurut Fahmi (2014: 101), bahwa laba bersih (*net income*) adalah: "... laba setelah pajak (*earning after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangi dengan pajak. Ini disebut juga dengan *net income* (laba bersih) atau *net profit* yang diterima oleh perusahaan".

Berdasarkan pengertian laba bersih di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa laba bersih merupakan pendapatan yang diterima oleh perusahaan lebih besar dari beban setelah dikurangi oleh pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Financial distress* terhadap **Konseervatisme Akuntansi**

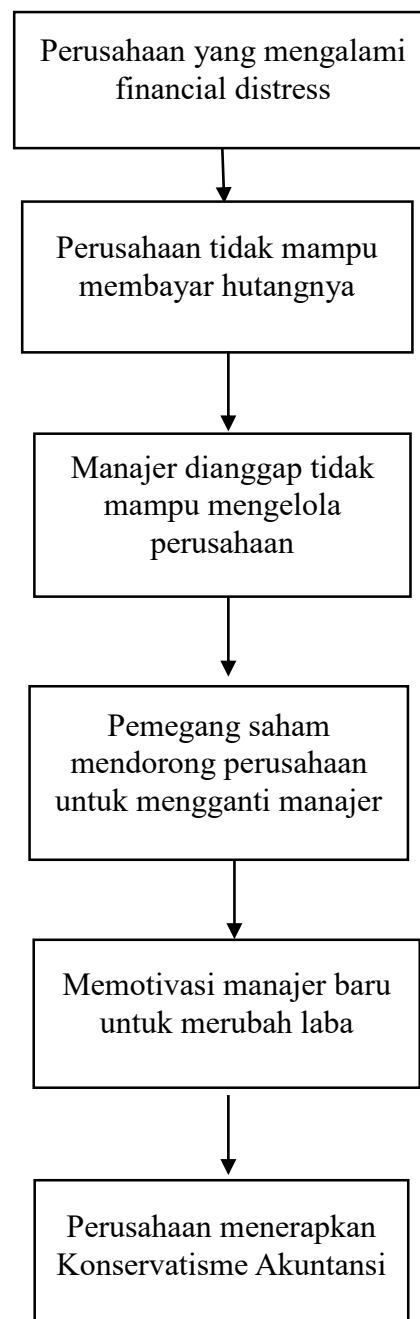
Financial distress memberikan sinyal atau gejala bahwa perusahaan akan mengalami suatu kondisi keuangan yang bermasalah, dimana perusahaan tersebut tidak lagi mampu membayar biaya-biaya, beban atau kewajibannya sehingga perusahaan tersebut akan cenderung memiliki hutang yang tinggi (Riyadi, 2022).

Ketika suatu perusahaan tidak mampu untuk memenuhi pembayaran atau ketika proyeksi arus kas menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajibannya. Kesulitan keuangan dapat mendorong pemegang saham untuk mengganti manajer perusahaan apabila manajer dianggap tidak mampu untuk mengelola perusahaan dengan baik. Hal ini akan memotivasi manajer untuk merubah laba yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja manajer dengan mengelola tingkat konservatisme yang berdasarkan laporan keuangan (Noviantari & Ratnadi, 2015).

Hal ini sejalan dengan penelitian Aryani dan Muliati (2020), Listya Sugiyarti dan Stefany Rina (2020), Ni Ketut Dewi Aryani dan Ni Ketut Muliati (2020) menyatakan bahwa *Financial distress* berpengaruh positif terhadap Konservatisme Akuntansi.

Kerangka pemikiran *financial distress* terhadap konservatisme akuntansi dapat dilihat pada gambar 2.1.

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* Terhadap
Konservatisme Akuntansi**



Gambar 2. 1
Kerangka pemikiran *Financial Distess* terhadap Konservatisme Akuntansi

2.2.2 Pengaruh Insentif pajak Terhadap Konservatisme Akuntansi

Menurut Suandy (2006) dalam Harini (2020) insentif pajak disebut dengan fasilitas pajak yang didefinisikan sebagai kemudahan atau keringanan yang diberikan pemerintah dalam hal perpajakan yang dapat digunakan dan dinikmati oleh investor baik local maupun luar negeri

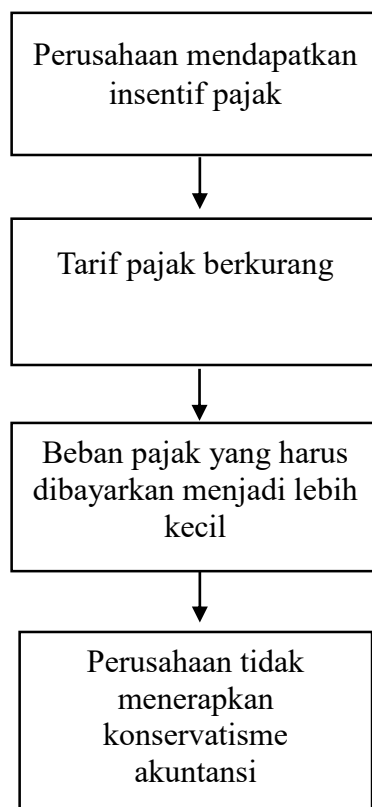
Menurut Sihotang dan Sinabutar (2020) dalam Rizki Krisna Yulia (2023) insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa peurunan tarif pajak yang bertujuan memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Wijaya dan Martini (2011) dalam Harini dan Muliati (2020) penurunan tarif pajak ini secara otomatis menguntungkan bagi perusahaan khususnya yang telah go public karena beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Ketika perusahaan mendapatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah dengan adanya pengurangan pajak, maka laporan keuangan secara konservatif tidak diterapkan (Fadhiilah dan Rahayuningsih, 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian Gustia Harini, Yesmira Syamra dan Puguh Setiawan (2020), Listya Sugiyarti dan Stefany Rina (2021), Hari Stiawan, Fitria Eka Ningsih dan Suciati Nurani (2022) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Kerangka pemikiran insentif pajak terhadap konservatisme akuntansi dapat dilihat pada gambar 2.2.

**Kerangka Pemikiran Pengaruh Insentif Pajak Terhadap
Konservatisme Akuntansi**



Gambar 2. 2
Kerangka pemikiran Insentif Pajak terhadap Konservatisme Akuntansi

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:63) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi

H2: Insentif Pajak berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi